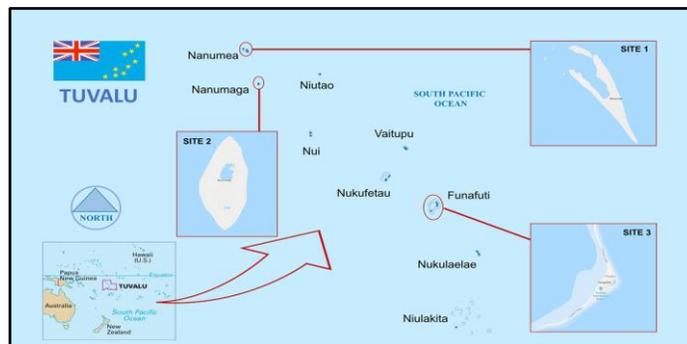


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, salah satu tantangan besar secara global adalah perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi sebuah ancaman besar bagi negara yang terdampak secara langsung. Tuvalu merupakan salah satu negara di Kepulauan Pasifik yang sedang menghadapi ancaman serius akibat kenaikan permukaan air laut yang mengakibatkan hilangnya eksistensi wilayah di Tuvalu, seperti hilangnya rumah masyarakat dan infrastruktur penting lainnya. Fenomena perubahan cuaca ekstrim seperti siklon, badai, dan gempa bumi juga rentan terdampak di Tuvalu akibat letak geografis yang rendah. Ditambah dengan mayoritas masyarakat di Tuvalu bergantung pada sumber daya alam di sekitar untuk bertahan hidup.



Gambar 1. 1 Peta Negara Tuvalu

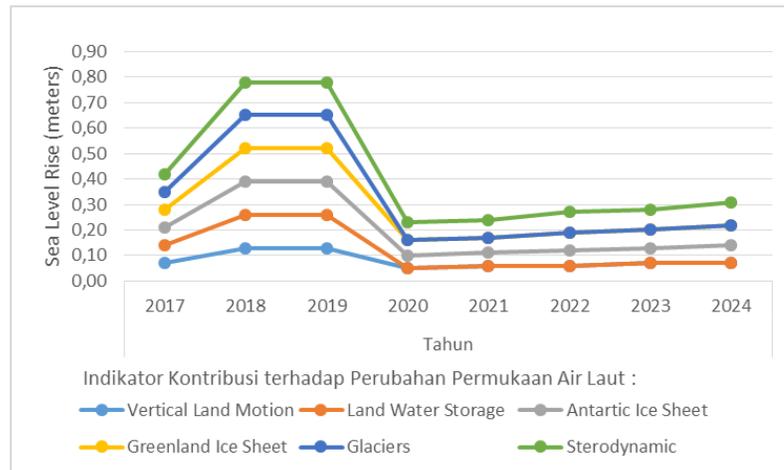
Sumber : (Tuvalu Coastal Adaptation Project (TCAP), 2018)

Dalam laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menjelaskan bahwa perubahan iklim yang terjadi saat ini belum pernah terjadi

sebelumnya, seperti kenaikan permukaan air laut yang signifikan (Leitzell & Caud, 2021). Fenomena kenaikan air laut secara global mencapai rata-rata 0,2 meter, yang berbahaya bagi negara-negara kepulauan kecil seperti Tuvalu (Prete, 2024). Oleh karena itu, fenomena kenaikan air laut mengancam eksistensi wilayah di Tuvalu. Kemudian adapun beberapa bencana alam terparah di Tuvalu, pertama Siklon Bebe pada tahun 1972 mengakibatkan enam orang meninggal dunia, sekitar 800 orang kehilangan tempat tinggal, hancurnya dinding karang di stasiun meteorologi Tuvalu akibat gelombang tinggi, hingga hancurnya wilayah Ibukota di Tuvalu yaitu Funafuti (Ralston et al., 2004). Pada sektor ekonomi saat itu, pemerintah Tuvalu mengalami kerugian hingga \$20 juta USD karena belum terbentuknya mekanisme kesiapsiagaan terhadap ancaman fenomena-fenomena perubahan iklim (Ralston et al., 2004).

Fenomena siklon selanjutnya di Tuvalu pada tahun 2015 yaitu Siklon Pam yang menyebabkan kerusakan cukup fatal, dengan 4.630 masyarakat membutuhkan bantuan makanan, serta lebih dari 25% kerugian *gross domestic product* atau sebanyak \$10 juta USD (The Government Of Tuvalu, 2015). Siklon Pam juga mempengaruhi berbagai sektor lainnya seperti sektor ekosistem lingkungan di Tuvalu yang mengalami erosi, agrikultural dan krisis makanan, kesehatan, pendidikan, serta kerusakan fatal pada infrastruktur penting lainnya. Fenomena perubahan iklim selanjutnya akibat El Nino dan La Nina menyebabkan kondisi cuaca ekstrim yaitu kekeringan di Tuvalu pada tahun 2011, 2019, dan 2022. Di tahun 2011 tidak terjadi curah hujan normal di Tuvalu selama 6 bulan, tepatnya pada bulan September 2011 curah hujan hanya mencapai 38

mm yang merupakan curah hujan terendah yang pernah terjadi di Tuvalu sejak 1930, sehingga menyebabkan ketersediaan air bersih menurun di bawah 20% (Emont et al., 2017). Bersamaan dengan krisis air bersih terjadi wabah diare di Tuvalu, begitu pula pada fenomena kekeringan di tahun 2019. Puncaknya di tahun 2022 kekeringan ekstrim terjadi hingga pemerintah Tuvalu mendeklarasikan keadaan darurat nasional, karena pasokan air hujan telah habis dan air tanah yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi (Tuvalu Offices, 2022).



Grafik 1. 1 Data Kenaikan Permukaan Air Laut di Tuvalu

Sumber : Data diolah penulis dari (Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC), 2021)

Fenomena-fenomena yang telah terjadi di Tuvalu menunjukkan bahwa kerentanan Tuvalu terhadap dampak dari perubahan iklim yang signifikan. Saat ini, urgensi perubahan iklim meningkat akibat kenaikan permukaan air laut. Berdasarkan pada grafik 1.1 diatas menunjukkan laporan kenaikan permukaan air laut di Tuvalu yang dijelaskan pada laman NASA *Sea Level Change Team* dalam *Pacific Flooding*

Analysis Tool, untuk memantau perkembangan kenaikan permukaan air laut secara global yang berdampak pada krisis wilayah di Tuvalu. Ditunjukkan dalam grafik bahwa indikator kenaikan permukaan air laut dipengaruhi oleh gerakan tanah vertikal, penyimpanan air di daratan, lapisan es Antartika, lapisan es di Greenland, gletser, dan sterodinamika. Pada tahun 2017 menunjukkan kenaikan permukaan air laut secara keseluruhan indikator berada pada 0,07 meter, kemudian meningkat di tahun 2018-2019 menjadi 0,13 meter. Adapun penurunan di tahun 2020 pada indikator *vertical land motion* dan *land water storage* yang berada di 0,05 meter, *greenland ice sheet* menjadi 0,06 meter, dan *sterodynamic* menjadi 0,07. Selanjutnya di tahun 2021-2024 terjadi peningkatan kembali dari seluruh indikator dengan rata-rata kenaikan 0,01 meter, hingga puncaknya di tahun 2024 indikator *vertical land motion* dan *land water storage* mencapai 0,07 meter, *greenland ice sheet* 0,08 meter, dan *sterodynamic* 0,09 meter.

Hasil pemantauan dari laporan tersebut membantu NASA *Sea Level Change Team* dalam memproyeksikan hingga tahun 2050, bahwa kenaikan permukaan air laut di wilayah Pasifik mencapai 8 inci. Apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan adaptasi atau pencegahan terhadap perubahan iklim akan mengakibatkan hilangnya wilayah Tuvalu secara total di tahun 2050 (NASA Sea Level Change Team Pacific Flooding Analysis Tool, 2024). Kenaikan ini menunjukkan laju kenaikan permukaan air laut dua kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan 30 tahun lalu (Brennan, 2023). Dampak kenaikan permukaan air laut di Tuvalu mengancam

ketahanan pangan penduduk, akibat rusaknya sumber air tawar dan tanaman pertanian yang kini hanya bergantung pada curah hujan serta memaksa mereka untuk meninggikan kebun pertanian (CNN Indonesia, 2024). Pada sektor ekonomi, pemerintah Tuvalu mengalami kerugian setiap tahunnya mencapai 7% dari total output ekonomi di Tuvalu, yang dapat meningkat hingga 50% per tahun jika tidak segera adanya tindakan penanganan terhadap permasalahan ini. (VOA Indonesia, 2024). Urgensi permasalahan di Tuvalu adalah tenggelamnya rumah sebagai tempat tinggal akibat kenaikan permukaan air laut. Oleh karena itu, proses sekuritisasi menjadi langkah penting bagi pemerintah Tuvalu untuk menyoroti urgensi dampak perubahan iklim di tingkat internasional sebagai ancaman nyata dari eksistensial wilayah mereka.

Beberapa fenomena yang telah terjadi di Tuvalu menyadarkan pemerintah Tuvalu untuk membingkai isu perubahan iklim yang membutuhkan tindakan lebih lanjut. Pemerintah Tuvalu mulai membingkai dan menyuarakan isu perubahan iklim sebagai ancaman eksistensial wilayahnya dengan mengeluarkan dokumen *Tuvalu Climate Change Policy 2012-2021* atau disebut juga dengan “Te Kaniva”. Dalam dokumen tersebut, dijelaskan bahwa adanya ancaman terhadap keamanan nasional Tuvalu salah satunya akibat kenaikan permukaan air laut “*Sea level rise is a direct threat to lives, assets, livelihoods, and ecosystems capacity*” (Government of Tuvalu, 2011). Adanya dokumen Te Kaniva sebagai langkah awal pemerintah Tuvalu dalam menjalankan proses sekuritisasi yang kemudian berkembang dengan membentuk rancangan kerangka kerja untuk mengatasi ancaman perubahan iklim melalui *National*

Climate Change Policy yang dibentuk berdasarkan pada komitmen *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), kemudian kebijakan tersebut dikembangkan oleh *Department of Climate Change* (DCC) pemerintah Tuvalu, melalui kerangka kerja *National Adaptation Plan* (NAP) (Government of Tuvalu, 2021). NAP merupakan kerangka kerja yang berfokus pada upaya adaptasi terhadap perubahan iklim (Government Tuvalu, 2022). Dalam penyusunan kerangka kerja NAP terdapat peranan penting oleh *National Advisory Council on Climate Change* (NACCC) dalam memberikan arahan pengembangan dari implementasi kerangka kerja NAP pada DCC (Government of Tuvalu, 2021). Bentuk upaya dalam kerangka kerja NAP terdiri dari lima proyek utama yakni: (1) The NAPA-1 (2010-2016); (2) The NAPA-I+ (2011-2013); (3) The NAPA-II (2013-2019); (4) *The Ridge to Reef* (R2R) *Project* (2015-2020); (5) *Tuvalu Coastal Adaptation Project* (TCAP) (2017-2024) (USAID, 2020).

TCAP merupakan proyek khusus yang dirancang oleh pemerintah Tuvalu dengan berfokus pada adaptasi ketahanan pesisir pantai yang berkoordinasi dengan UNDP dalam pelaksanaan proyek ini. Pelaksanaan TCAP didukung melalui bantuan pendanaan oleh *Green Climate Fund* (GCF) yang dipilih oleh UNFCCC melalui rapat integral GCF secara sah sejak penandatanganan perjanjian *Financing Agreement* pada 7 Juni 2017 (Green Climate Fund, 2016). Adapun pendanaan tambahan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (TCAP For Tuvalu, 2018). TCAP berfokus pada lima kunci keamanan iklim dalam menghadapi perubahan iklim sebagai urgensi yaitu keamanan wilayah, air dan makanan, tantangan ekonomi, mobilitas

penduduk, dan risiko bencana alam (Peacebuilding Fund et al., 2022). Dalam penelitian, TCAP digunakan untuk menganalisis proses sekuritisasi isu perubahan iklim di Tuvalu karena fokus utama proyek dalam mengatasi krisis pengikisan wilayah akibat kenaikan permukaan air laut, serta dengan bentuk mekanisme adaptasi jangka panjang (*long term adaptation plan*) selama 7 tahun yang didukung oleh tindakan kolaboratif dari organisasi internasional.

Guna memperjelas gap penelitian, maka ada tiga literatur terdahulu yang digunakan. Pertama, penelitian yang berjudul “Sekuritisasi Isu Perubahan Iklim sebagai Ancaman Keamanan Manusia di Wilayah Perbatasan Turkana Kenya” oleh Christina Shavira Natalia (2021) yang mengkaji proses sekuritisasi di Turkana, menyoroti kebutuhan bantuan untuk menghadapi perubahan iklim yang mengancam keamanan manusia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses sekuritisasi berhasil dengan dukungan dari UNDP yang meningkatkan kepedulian masyarakat dan kinerja pemerintah Turkana terhadap kondisi lingkungan. Penelitian kedua, karya Muhammad Ghiffari Irfansyah (2019) berjudul “Upaya Sekuritisasi Perubahan Iklim di Kepulauan Pasifik: Studi Kasus Nansen Initiative dan Upaya Negara-Negara Pasifik” membahas proses sekuritisasi dan perbandingan antara Nansen Initiative dan Negara-Negara Kepulauan Pasifik dalam menghadapi perubahan iklim. Penelitian tersebut lebih berfokus pada perbandingan upaya, dampak, dan wacana *climate refugee*. Penelitian ketiga berjudul “Sekuritisasi Pemerintahan Kiribati dalam Isu Kenaikan Air Laut Tahun 2012-2016” karya Abyan Bari Bhramanta (2023) terkait

proses sekuritisasi pemerintah Kiribati terhadap isu kenaikan air laut melalui kebijakan *migration with dignity*.

Mengacu pada tiga literatur tersebut, ditemukan adanya gap atau celah yang teridentifikasi. Gap dari ketiga literatur sebelumnya terletak pada perbedaan objek masing-masing penelitian dan pendekatan yang berbeda. Objek penelitian oleh Christina Shavira Natalia (2021) berfokus di wilayah Turkana dengan pendekatan pada proses sekuritisasi yang mengancam *human security*, lalu Muhammad Ghiffari Irfansyah (2019) berfokus di Kepulauan Pasifik namun tidak secara spesifik pada negara tertentu dengan menggunakan pendekatan kebijakan *migration with dignity*. Terakhir, Abyan Bari Bhramanta (2023) memiliki fokus penelitian di Kiribati dalam isu kenaikan permukaan air laut. Dengan demikian, gap yang digunakan pada skripsi ini adalah spesifikasi objek pada pemerintahan Tuvalu yang kurang mendapatkan sorotan terhadap urgensi isu perubahan iklim sehingga memerlukan proses sekuritisasi, dengan menggunakan teori sekuritisasi terbaru milik (Buzan et al., 1998), sehingga jeda penelitian dari skripsi ini adalah proses sekuritisasi isu perubahan iklim oleh Pemerintah Tuvalu melalui *Tuvalu Coastal Adaptation Project* tahun 2012-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah “Bagaimana proses

sekuritisasi isu perubahan iklim yang dilakukan oleh Pemerintah Tuvalu melalui *Tuvalu Coastal Adaptation Project* tahun 2012-2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan jenjang pendidikan strata 1 dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Serta melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pandangan studi Hubungan Internasional bagi para peneliti selanjutnya, pembaca, maupun akademisi.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses sekuritisasi isu perubahan iklim oleh Pemerintah Tuvalu melalui *Tuvalu Coastal Adaptation Project* yang berlangsung dari tahun 2012 hingga 2024. Penelitian ini menjelaskan proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Tuvalu sebagai aktor sekuritisasi dalam menyatakan sebuah isu sebagai bentuk ancaman, kemudian objek yang terancam, target yang harus diyakinkan, hingga aksi yang dilakukan dalam menanggapi adanya perubahan iklim.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Konsep *Climate Change*

Seperti latar belakang yang telah dijelaskan bahwa perubahan iklim saat ini menjadi sorotan global karena memberikan dampak secara langsung bagi keamanan negara maupun masyarakat. Sebagai contoh peningkatan cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, kenaikan permukaan air laut, hingga pemanasan global. Sebelumnya isu perubahan iklim tidak menjadi sorotan karena dianggap sepele dan tidak mengancam kesejahteraan secara global. Faktanya, seiring perkembangan zaman manusia tidak mempertimbangkan penggunaan bijak dalam pemanfaatan teknologi pada aktivitas yang mempengaruhi perubahan iklim. Setelah terjadinya perubahan iklim secara signifikan, kesadaran terhadap pentingnya tindakan untuk mengatasi permasalahan ini baru berkembang di masyarakat global.

Didefinisikan oleh Rawat, Kumar, dan Khati (2024) bahwa *climate change* merupakan tindakan yang terjadi akibat aktivitas manusia seperti deforestasi, pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas industri yang mempengaruhi pola iklim global dalam peningkatan cuaca ekstrim, seperti peningkatan suhu global dan kenaikan permukaan air laut. Pendapat lainnya terkait definisi *climate change* dijelaskan oleh Antaki & Liverman (2018) sebagai fenomena multidimensi yang kompleks ditandai dengan perubahan suhu, curah hujan, dan pola cuaca yang berkelanjutan. Hal ini diakibatkan oleh faktor aktivitas manusia yang dapat menimbulkan dampak serius pada tatanan ekosistem global. Secara umum dari dua definisi tersebut perubahan iklim yang

terjadi saat ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang belum bijak dalam penggunaan sumber daya alam seperti penggunaan batu bara dan minyak bumi sehingga mempengaruhi peningkatan suhu bumi, dan menyebabkan *domino effect* pada stabilitas ekosistem secara global (Rawat, Kumar, & Khati, 2024).

1.4.2 Teori Sekuritisasi

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teori sekuritisasi terbaru milik Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap De Wilde yang berjudul *Security : A New Framework For Analysis*. Teori sekuritisasi ini dikembangkan dari *Copenhagen School* sebagai salah satu kerangka teori penting dalam menganalisis isu-isu keamanan dalam studi Hubungan Internasional. Melalui perspektif yang disampaikan oleh (Buzan et al., 1998) membuka pandangan baru dalam menganalisis isu-isu keamanan internasional yang berawal dari konsep keamanan tradisional, kini terbagi menjadi beberapa aspek yaitu aspek militer, lingkungan, ekonomi, sosial dan politik. Melalui pembagian ini, memudahkan negara dalam memetakan kemungkinan ancaman yang dapat terjadi di era kini hingga memerlukan tindakan preventif ataupun solutif dalam menanganinya.

Berkembangnya isu-isu internasional yang semakin kompleks, dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi, sehingga mulai bermunculan ancaman-ancaman dalam Hubungan Internasional. Didefinisikan (Bhramanta, 2023) bahwa ancaman saat ini tidak hanya mengacu pada fisik atau militer saja, tetapi dapat berkembang menjadi ancaman politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Suatu isu yang dianggap sebagai sebuah ancaman kini didefinisikan menjadi 3 yaitu (1) *threats to human civilization*

from the natural environment that are not caused by human activity, (2) threats from human activity to the natural systems of structure of the planet, (3) threats from human activity to natural systems when the changes made not seem to pose existential threats to civilization (Buzan et al., 1998). Melalui definisi tersebut menjadi dasar pengembangan sebuah keamanan internasional.

Dalam konteks ini, dijelaskan bahwa setelah berkembangnya identifikasi terhadap ancaman keamanan saat ini, maka proses sekuritisasi didefinisikan sebagai *“The move that takes an issue beyond the established rules of the game and frames the issue as either a special kind of politic or as above politics”*. Secara sederhana, sekuritisasi diartikan sebagai bentuk penanganan khusus yang diperlukan untuk menghadapi ancaman yang awalnya dianggap sepele, namun ternyata memiliki potensi sebagai ancaman serius bagi kedaulatan negara maupun keamanan masyarakat. Waever (2011) membingkai beberapa tahapan sebagai kunci dari sekuritisasi yaitu identifikasi urgensi isu yang terjadi, mencari relevansi penerapan teori sekuritisasi terhadap isu tersebut, dan analisis proses penyelesaian yang tepat.

Tahapan dari analisis suatu isu yang memerlukan proses sekuritisasi terbagi menjadi *non-politicized*, *politicized*, dan *to securitized* (Buzan et al., 1998). *Non-politicized* merupakan tahapan sebuah fenomena atau isu belum dianggap sebagai permasalahan politik serius sehingga tidak membutuhkan penanganan secara khusus. Sedangkan *politicized* memasuki tahapan yang dianggap sebagai *“the issue has raised public concerns and is on the agenda”* menurut (Eroukhmanoff, 2018) namun

penanganannya belum membutuhkan tindakan khusus. Selanjutnya *to securitized* tahapan dimana sebuah isu sudah diakui sebagai ancaman yang harus segera ditangani karena memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga memerlukan tindakan khusus, tidak hanya berupa pembentukan kebijakan namun proses sekuritisasi.

Berkembangnya isu keamanan internasional yang semakin kompleks akan mempengaruhi perkembangan pada komponen-komponen dalam proses sekuritisasi. Komponen-komponen yang dibingkai dalam jalannya proses sekuritisasi saat ini oleh (Buzan et al., 1998) yaitu adanya (1) *securitizing actor* yang terbagi menjadi *lead actor*, *veto actor*, *functional* atau *supporting actor*, dan *economic actor*. *Securitizing actor* selalu berkaitan dengan komponen selanjutnya karena proses sekuritisasi dapat berjalan dengan aktor melakukan (2) *securitizing move* berupa *speech act* yaitu tindakan pernyataan isu yang teridentifikasi sebagai ancaman bagi keamanan negara atau (3) *existential threat* sehingga memerlukan adanya proses sekuritisasi. Selanjutnya, dalam menghadapi ancaman terdapat (4) *referent object* sebagai objek yang terancam dari isu yang terjadi. Adapun (5) *extraordinary measures* sebagai tindakan luar biasa yang dilakukan oleh aktor untuk menyampaikan urgensi ancaman kepada *audience* untuk mendapatkan penerimaan sehingga proses sekuritisasi dapat berjalan, (6) *audience* sebagai target yang harus diyakinkan oleh *securitizing actor* dalam membingkai isu yang terjadi sebagai ancaman keamanan, bentuk penerimaan *audience (acceptance by audience)* akan bergantung pada tindakan luar biasa (Buzan, Wæver, & Wilde, Security: A New Framework for Analysis, 1998).

Komponen pertama dalam proses sekuritisasi, yaitu *securitizing actor* terbagi menjadi beberapa aktor lainnya dengan peranan masing-masing. (1) *Lead actor* atau aktor utama yang berperan menjalankan proses sekuritisasi dengan melakukan *securitizing move*, maka aktor utama adalah pemerintah atau negara dan organisasi internasional yang berkaitan secara langsung dalam menjalankan proses sekuritisasi. (2) *Veto actor* yaitu aktor yang memiliki kemampuan untuk menolak atau menghalangi proses sekuritisasi yang berasal dari kelompok masyarakat sipil ataupun lembaga sosial masyarakat sebagai contoh *Global Climate Coalition*, apabila merasa terancam atas *securitizing move* yang dilakukan oleh aktor utama. (3) *Functional* atau *supporting actor* yaitu aktor yang memberikan dukungan dalam proses sekuritisasi, dapat berupa dukungan secara teknis, informasi, legitimasi, maupun sumber daya yang dibutuhkan, maka aktor pendukung dapat berupa organisasi non-pemerintah (NGO), kelompok masyarakat sipil, dan negara lain yang ingin mendukung jalannya sekuritisasi. Terakhir yaitu (4) *Economic actor* atau aktor yang berperan sebagai penyedia sumber daya atau investasi dalam proses sekuritisasi, dapat berupa komunitas atau organisasi internasional, ataupun lembaga ekonomi internasional (Buzan et al., 1998).

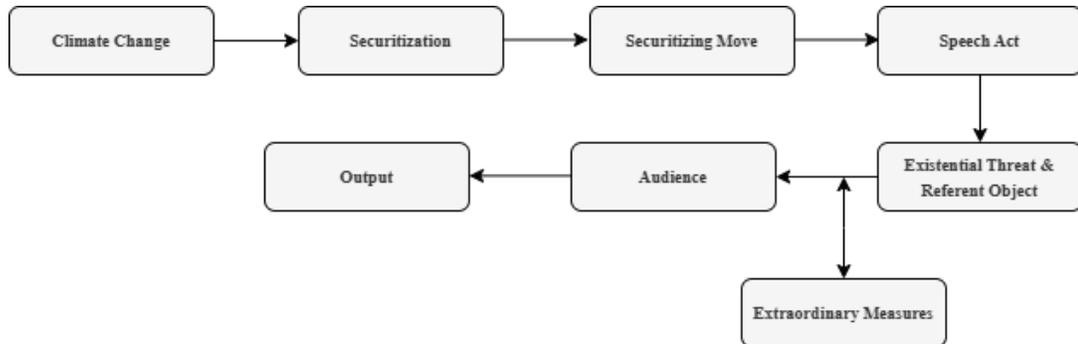
Selanjutnya proses sekuritisasi dapat berjalan apabila *securitizing actor* melakukan *securitizing move*, kedua komponen tersebut saling berkaitan dalam memulai jalannya proses sekuritisasi. *Securitizing move* merupakan tindakan pernyataan suatu isu sebagai ancaman serius yang dibingkai melalui tindakan politik, diplomasi, dan langkah yang diambil oleh *securitizing actor* khususnya *lead actor*

melalui *speech act* (pernyataan verbal) untuk membingkai isu dalam konteks keamanan (Buzan et al., 1998). Maka dari itu, kedua komponen tersebut saling berkaitan dalam proses sekuritisasi. Kemudian sejalan dengan identifikasi terhadap ancaman atau *existential threat* sebagai urgensi suatu isu untuk melindungi objek yang terancam atau dikenal sebagai *referent object*.

Dari tindakan tersebut, *audience* merupakan komponen penting yang berperan dalam merespon proses sekuritisasi yang dijalankan untuk menentukan penerimaan atau penolakan atas isu yang diangkat sebagai urgensi keamanan, dapat dilakukan oleh komunitas tertentu atau organisasi non pemerintah (NGO) yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diangkat dan media publik (Buzan et al., 1998). Proses sekuritisasi dapat berhasil apabila adanya bentuk penerimaan dari *audience* yang dapat dilihat dari dukungan yang diberikan melalui media ataupun secara langsung selama pelaksanaan proses sekuritisasi. Sebelum menentukan adanya penerimaan atau penolakan dari *audience*, terdapat *extraordinary measures* yaitu tindakan luar biasa yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi sebagai upaya meyakinkan *audience* terhadap urgensi penyelesaian ancaman isu, kemudian menghasilkan penerapan kebijakan hingga pelaksanaan mekanisme proyek (Does, *The Construction of the MARAS Between Policization and Securitization*, 2013). Apabila aksi dari *extraordinary measures* berhasil membuat *audience* teryakinkan, maka proses sekuritisasi dapat dikatakan berhasil. Sehingga *extraordinary measures* menjadi peran penting terhadap kunci akan keberhasilan proses sekuritisasi.

Berdasarkan pemaparan proses sekuritisasi melalui komponen-komponen tersebut, penelitian kali ini disederhanakan dengan menganalisis jalannya proses sekuritisasi melalui lima komponen. Pertama, *securitizing move* yang dilakukan oleh *securitizing actor* melalui *speech act*, tindakan untuk membingkai isu sebagai ancaman serius. Kedua yaitu *existential threat* yang didefinisikan sebagai isu yang menjadi permasalahan dan mengancam keamanan, ketiga *referent object* sebagai identifikasi objek yang terancam. Keberhasilan penerimaan audiens (*acceptance by audience*) dalam proses sekuritisasi ditentukan melalui tahap *extraordinary measures*. Melalui tindakan luar biasa yang diambil oleh aktor sekuritisasi untuk melindungi *referent object* dari ancaman yang ada akan menjadi indikator utama dalam menilai bentuk penerimaan audiens. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dinamika proses sekuritisasi (Islamy, 2024).

1.5 Sintesa Pemikiran



Sumber : Penulis

Berdasarkan pada teori yang telah dijelaskan, maka menghasilkan sebuah sintesa pemikiran seperti bagan diatas. Isu perubahan iklim atau *climate change* dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat, hingga menjadi sebuah urgensi yang memerlukan proses sekuritisasi. Hal ini menjadi bukti bahwa konsepsi keamanan tradisional telah berkembang menjadi adanya ancaman dari sektor lainnya terhadap keamanan negara dan masyarakat. Proses sekuritisasi melibatkan serangkaian komponen yang telah difokuskan menjadi *securitizing move* berupa *speech act* yang dilakukan oleh *securitizing actor*. Kemudian terdapat *referent object* yaitu objek yang harus dilindungi dari sebuah ancaman atau *existential threat*. Menanggapi isu yang terjadi, aktor akan mengambil tindakan-tindakan luar biasa melalui *extraordinary measures* untuk memaparkan urgensi yang ada untuk meyakinkan *audience* dalam menjalankan proses sekuritisasi. Bentuk penerimaan *audience* akan menghasilkan *output* berupa kebijakan atau tindakan yang diambil oleh aktor dalam melindungi

referent object dari ancaman yang ada. Melalui sintesa pemikiran ini penulis ingin menunjukkan bagaimana isu perubahan iklim dalam proses sekuritisasi.

1.6 Argumen utama

Urgensi dari perubahan iklim yang berkembang menjadi sebuah ancaman bagi keamanan negara, khususnya Tuvalu yang rentan terdampak oleh perubahan iklim dengan kenaikan permukaan air laut secara signifikan. Hal ini mengancam eksistensi wilayah Tuvalu dan kesejahteraan hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam sekitar. Melalui analisis dalam komponen sekuritisasi maka *securitizing actor* dalam proses sekuritisasi terbagi menjadi *lead actor* yaitu pemerintah Tuvalu dan UNDP, *functional* atau *supporting actor* yaitu Australia dan Selandia Baru, *veto actor* yaitu NGO di Tuvalu antara lain *Tribal Link*, dan *Tuvalu Association of Non Government Organisations* (TANGO), dan *economic actor* yaitu *Green Climate Fund*. Dalam menghadapi ancaman atau *existential threat* dari kenaikan permukaan air laut yang menyebabkan krisis wilayah hingga kerusakan infrastruktur-infrastruktur penting yang mengancam masyarakat di Tuvalu, sehingga disebut sebagai *referent object* dalam penelitian kali ini. Pemerintah Tuvalu mulai menyadari terhadap urgensi perubahan iklim sebagai ancaman dengan mengeluarkan dokumen *Tuvalu Climate Change Policy* pada tahun 2012-2021, namun karena keterbatasan upaya penanganan dampak perubahan iklim belum dapat berjalan maksimal. Oleh karena itu tindakan yang diambil oleh *securitizing actor* melalui *securitizing move* telah beberapa kali

dilakukan melalui deklarasi Kainaki II (2019), pernyataan mandiri oleh Perdana Menteri Tuvalu, COP26 (2021) dan COP27 (2022). Terdapat *audience* yang diidentifikasi melalui bentuk penerimaan untuk meyakinkan urgensi dari suatu ancaman adalah masyarakat sipil, komunitas internasional, organisasi non pemerintahan (NGO), masyarakat global, bahkan pemerintahan Tuvalu. Bentuk meyakinkan *audience* (acceptance by audience) ditentukan dengan tindakan luar biasa atau *extraordinary measures* yang diambil pemerintah Tuvalu untuk menangani isu perubahan iklim melalui *Tuvalu Coastal Adaptation Project* dengan tindakan pembangunan infrastruktur perlindungan pantai melalui *berm top barriers* dan penggunaan teknologi canggih *Light Detection and Ranging* (LiDAR), reklamasi tanah di Funafuti, serta peningkatan sumber daya manusia dan pemerintahan melalui program pendidikan dan pelatihan komunitas.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam setiap penelitian terdapat metode penelitian yang berbeda-beda tergantung pada tujuan yang hendak dicapai penulis dalam menjawab rumusan masalah. Pemilihan metode penelitian harus relevan dengan data yang digunakan. Oleh karena itu dalam skripsi kali ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut (Adiputra et al., 2021) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang terjadi seperti fenomena alam

atau fenomena buatan manusia untuk dianalisis atau memberikan penggambaran terkait fenomena tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dinilai penulis sebagai pilihan yang tepat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dengan berdasarkan pada fakta yang terjadi, sehingga tidak berfokus pada kausalitas dari fenomena tersebut. Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif maka relevan dalam menjawab rumusan masalah yang ada, untuk menggambarkan proses sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Tuvalu dalam menghadapi fenomena perubahan iklim yang mengancam eksistensi wilayah dan keamanan manusia.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan jangkauan pada tahun 2012 hingga 2024. Pemilihan jangkauan tahun tersebut berawal dari pemerintah Tuvalu mbingkai isu perubahan iklim sebagai suatu ancaman eksistensial yang memerlukan proses sekuritisasi dengan terbentuknya dokumen kebijakan “Te Kaniva” atau *Tuvalu Climate Change Policy* pada tahun 2012. Dokumen tersebut berisi pemaparan kebijakan strategis dengan jangka panjang yang mbingkai isu perubahan iklim sebagai ancaman eksistensial untuk dihadapi, kemudian berkembang hingga adanya *Tuvalu Coastal Adaptation Project* sebagai langkah proses sekuritisasi terhadap isu perubahan iklim yang dijalankan pada tahun 2017 hingga 2024. Proyek ini dirancang dengan jangka panjang akibat urgensi kenaikan permukaan air laut dan intensitas badai yang signifikan, sehingga memerlukan langkah adaptasi secara cepat. Adapun alasan proyek ini diakhiri pada tahun 2024, karena akan ada evaluasi yang dilakukan pada

akhir periode proyek TCAP. Faktor lainnya dari pemilihan TCAP sebagai analisis dari proses sekuritisasi adalah atas dasar proyek ini merupakan proyek adaptasi jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah Tuvalu.

Melalui penerapan teori sekuritisasi milik Barry Buzan (1998), jangkauan penelitian pada tahun 2012 merupakan identifikasi tahapan analisis isu *politicized* yang menunjukkan isu lingkungan yang terjadi di Tuvalu mulai menjadi sorotan masyarakat dan pemerintah. Kemudian berkembang hingga adanya TCAP pada tahun 2017-2024 sebagai tahapan analisis isu *to securitized* yang membutuhkan adanya proses sekuritisasi dengan mengambil tindakan luar biasa. Dengan demikian, jangkauan dalam penelitian kali ini ditujukan agar pembahasan lebih terfokus dan mendalam pada konteks pembahasan isu perubahan iklim sebagai ancaman serius bagi pemerintahan Tuvalu dengan proses sekuritisasi yang dilakukan menggunakan variabel *Tuvalu Coastal Adaptation Project*.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Setelah menentukan metode dan jangkauan yang digunakan dalam penelitian kali ini, maka harus didukung dengan data-data yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah studi pustaka atau studi literatur. Menyesuaikan dengan rumusan masalah dan metode penelitian yang digunakan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan sumber data sekunder yaitu studi pustaka. Teknik pengumpulan data studi pustaka yang dilakukan dalam skripsi kali ini, diperoleh secara *online* melalui jurnal, artikel, buku, situs dan berita

resmi, maupun dokumen penelitian sebelumnya yang relevan dengan pembahasan untuk menjadi acuan penulis.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Berdasarkan pada permasalahan yang dikaji dalam penelitian kali ini, teknik analisis data yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Pada umumnya teknik analisis data kualitatif sering digunakan dalam penelitian studi Hubungan Internasional untuk menjelaskan fenomena kompleks yang terjadi. Menurut (Cresweel & Cresweel, 2018) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai salah satu metode penelitian yang mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan melakukan proses dalam memahami makna dari sebuah permasalahan, yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, serta menganalisis data yang dijadikan sebagai acuan. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif maka jenis data yang digunakan berupa naratif tidak berbentuk angka. Alasan penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif karena teknik tersebut sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan mendeskripsikan fenomena perubahan iklim di Tuvalu dan proses sekuritisasi yang dilakukan menggunakan *Tuvalu Coastal Adaptation Project* tahun 2012-2024.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Setelah pemaparan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga argumen utama maka sebuah penelitian memerlukan sistematika penulisan untuk memudahkan pemahaman dan arah dari pembahasan penelitian kali ini.

BAB I : Merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian yang terbagi menjadi tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian bagian terakhir adalah Sistematika Penulisan.

BAB II : Merupakan bagian pembahasan yang akan diisi oleh penulis dengan analisis proses sekuritisasi pada komponen *securitizing move*, *speech act*, *existential threat* dan *referent object*.

BAB III : Merupakan bagian penulis untuk menjelaskan analisis proses sekuritisasi pada komponen *extraordinary measures*, *audience*, dan *output*.

BAB IV : Merupakan bagian Kesimpulan dan Saran.